



## **Pendampingan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Kabupaten Pemalang**

**Maskudi<sup>1</sup>, Ratih Pratiwi<sup>2</sup>✉, Eva Fatimah<sup>3</sup>, Yulekhah Ariyanti<sup>4</sup>**

Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim, Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>

E-mail: [maskudi@unwahas.ac.id](mailto:maskudi@unwahas.ac.id)<sup>1</sup>, [rara@unwahas.ac.id](mailto:rara@unwahas.ac.id)<sup>2</sup>, [eva@unwahas.ac.id](mailto:eva@unwahas.ac.id)<sup>3</sup>,  
[yulekhah\\_ariyanti@unwahas.ac.id](mailto:yulekhah_ariyanti@unwahas.ac.id)<sup>4</sup>

### **Abstrak**

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan yang merupakan salah satu cara dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah sejak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Dalam hal ini pemerintah menerapkan pendekatan-pendekatan baru guna menggerakkan roda perekonomian pedesaan melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Metode yang digunakan adalah metode observasi, metode identifikasi potensi dan permasalahan, dan audiensi dan kolaborasi. Kegiatan Pendampingan Forum Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) bersama gelar audiensi dalam rangka genjot perekonomian desa wilayah Kabupaten Pemalang di *House Of Bumdes* Kecamatan Comal. Pendampingan ini merupakan kolaborasi Bapenda, Samsat, pakar digital, pakar ekonomi, dan trainer. Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa masih perlu kerjasama dan intensitas pembinaan dari kelembagaan forum Bumdes bersama Kabupaten Pemalang sehingga bisa bersinergi dan berkolaborasi dalam meningkatkan aktifitas perekonomian desa.

**Kata kunci:** BUMDes, kepemimpinan, *marketing mix*

### **Abstract**

*Development basically aims to build self-reliance, including rural development, which is one way to reduce poverty in Indonesia. The development of the economic base in rural areas has long been carried out by the government through various programs. However, these efforts have not yielded the satisfactory results we all wanted. In this case the government applies new approaches to move the wheels of the rural economy through the establishment of economic institutions that are fully managed by the village community, namely Village-Owned Enterprises (BUMDes). The method used is the method of observation, methods of identification of potentials and problems, and audience and collaboration. Village-Owned Enterprises (BUMDesa) Forum Assistance Activities together with an audience held in the context of boosting the village economy in Pemalang Regency at the House Of Bumdes, Comal District This assistance is a collaboration between Bapenda, Samsat, digital experts, economists and trainers. The results of the implementation show that there is still need for cooperation and intensity of coaching from the Bumdes forum with Pemalang Regency so that they can work together and collaborate in increasing village economic activities.*

**Keywords:** BUMDes, leadership, *marketing mix*

Copyright (c) 2022 Maskudi, Ratih Pratiwi, Eva Fatimah, Yulekhah Ariyanti

✉ Corresponding author

Address : Universitas Wahid Hasyim

Email : [rara@unwahas.ac.id](mailto:rara@unwahas.ac.id)

DOI : <https://doi.org/10.31004/abdidas.v3i3.583>

ISSN 2721- 9224 (Media Cetak)

ISSN 2721- 9216 (Media Online)

## PENDAHULUAN

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang RI 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berkedaulatan rakyat. Titik berat pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan selaras, serasi dan seimbang guna keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Bertitik tolak pada pembangunan tersebut, maka pemerintah dan rakyat Indonesia mempunyai kewajiban untuk menggali, mengolah dan membina kekayaan alam tersebut guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945.

Hal tersebut merupakan sebuah konsekuensi logis bagi bangsa Indonesia yang memang sebagian besar penduduk hidup di daerah pedesaan yang mencapai 70% dari keseluruhan penduduk di Indonesia. Sehingga titik sentral pembangunan adalah daerah pedesaan. Arti penting pembangunan pedesaan adalah menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan, usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, kesenjangan desa dan kota akan dapat lebih diwujudkan.

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan membangun kemandirian, termasuk pembangunan

pedesaan. Salah satu misi pemerintah adalah membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan. Tujuannya, adalah untuk memberi peluang bagi kemampuan daerah dan pedesaan sebagai tulang punggung ekonomi regional dan nasional.

Pembangunan pedesaan merupakan salah satu cara dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah sejak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Hal ini senada dengan pendapat bahwa, “berbagai kebijakan pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat, tidak melibatkan sepenuhnya aspirasi masyarakat, tentang apa yang diinginkan dan bisa dilakukan masyarakat, yang sifatnya membangun kepedulian dan kemampuan pembangunan dari masyarakat itu sendiri (Sandiasa, 2017). Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada

ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Pemberdayaan merupakan suatu upaya yang harus diikuti dengan tetap memperkuat potensi atau sumber daya yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Hal ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan serta membuka akses terhadap berbagai peluang yang nantinya dapat membuat masyarakat menjadi semakin berdaya. Dalam hal ini pemerintah menerapkan pendekatan-pendekatan baru guna menggerakkan roda perekonomian pedesaan melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BUMDes dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pasal 87 ayat (1) disebutkan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dan tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014. Pendirian Badan Usaha Milik Desa ini disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung kebijakan daerah kabupaten atau kota yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat desa dari ancaman persaingan pemodal besar. Mengingat BUMDes merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan.

Di dalam Undang-Undang terbaru Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa

pelayanan dan usaha lainya untuk kesejahteraan desa. Dari Undang-Undang Desa tersebut disimpulkan bahwa BUMDes saat ini dapat memegang peranan penting dalam pemberdayaan dan pengembangan potensi desa, khususnya dalam mengelola keuangan desa yang ada di wilayahnya. Keberadaan BUMDes ini diharapkan menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Kabupaten Pemalang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di pantai utara Pulau Jawa. Secara astronomis Kabupaten Pemalang terletak antara 1090 17' 30" – 1090 40' 30" BT dan 80 52' 30" – 70 20' 11" LS.

Pusat pemerintahan Kabupaten ini berjarak kira-kira 135 Km dari Kota Semarang (Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah) ke arah barat, atau jika ditempuh dengan kendaraan darat memakan waktu lebih kurang 2-3 jam. Kabupaten Pemalang memiliki luas wilayah sebesar 1.115,30 km<sup>2</sup>. Wilayah ini di sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tegal. Dengan demikian Kabupaten Pemalang memiliki posisi yang strategis, baik dari sisi perdagangan maupun pemerintahan.

Kabupaten Pemalang memiliki topografi bervariasi. Bagian Utara merupakan daerah pantai dengan ketinggian berkisar antara 1-5 meter di atas permukaan laut. Bagian tengah merupakan dataran rendah yang subur dengan ketinggian 6-15 m di atas permukaan laut dan bagian Selatan merupakan

dataran tinggi dan pengunungan yang subur serta berhawa sejuk dengan ketinggian 16-925 m di atas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Pemalang ini dilintasi dua buah sungai besar yaitu Sungai Waluh dan Sungai Comal yang menjadikan sebagian besar wilayahnya merupakan daerah aliran sungai yang subur.

Secara administratif Kabupaten Pemalang terdiri atas 14 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Pemalang, kecamatan-kecamatan tersebut adalah Pemalang, Taman, Petarukan, Bantarbolang, Randudongkal, Moga, Warungpring, Belik, Pulosari, Watukumpul, Ampelgading, Bodeh, Comal, dan Ulujami.

Kabupaten Pemalang di kenal pula mempunyai banyak produk unggulan seperti Sentra tenun ATBM, konveksi, kerajinan kulit ular, dan sapu glagah, dan masih banyak potensi yang bisa di gali di bumi Pemalang tersebut.

Selain itu pula Pemalang mempunyai keragaman seni budaya yang masih di lestarikan diantaranya sintren, kuntulan, dsb, dan untuk kuliner Pemalang mempunyai bebrapa makanan khas seperti Grombyang, sate Loso, Lontong Dekem, Tahu Campur, Apem comal, khamir arab dan sebagainya.

Kandungan sumber daya alam yang paling potensial di Kabupaten Pemalang khususnya pemalang bagian selatan yang terletak di lereng Gunung Slamet adalah berupa Tambang Diorit, Kaolin, Batu Gamping, dan Batu Marmer.

Pasar Sayur dan Buah kini telah berdiri di Pemalang dan menjadi sub terminal agrobisnis kecamatan penghasil komoditi sayur dan buah juga

dimaksudkan sebagai pusat bisnis ekonomi masyarakat antar dan inter daerah.

Kegiatan ekonomi rakyat yang menjadi andalan di Kabupaten Pemalang adalah industri kecil pakaian jadi atau konveksi dan salah satunya adalah masuknya investor dari Jepang dengan mendirikan Pabrik Garment untuk memenuhi kebutuhan ekspor tekstil Indonesia. Hasil industri tekstil dan tenun meliputi sarung tenun, sarung palekat, kaos kaki dan goyor. Sementara itu kerajinan gerabah, sapu glagah, kerajinan kulit ular juga telah mampu menembus pasaran ekspor ke singapura dan Malaysia.

Kabupaten Pemalang memiliki posisi yang strategis, baik dari sisi perdagangan maupun pemerintahan. Dan menyimpan potensi sumber daya alam dengan panorama keindahan alam yang memikat serta sumber daya manusia yang sangat besar menjadikan Kabupaten Pemalang sebagai sebuah potensi laksana permata yang terpendam yang siap untuk digali.

Topograf alamnya yang berupa dataran pantai, dataran rendah, dataran tinggi serta daerah pegunungan sehingga menjadikan tanah di Kabupaten Pemalang memiliki tanah yang subur dengan panorama yang asri dan indah sangat tepat untuk berwisata maupun melakukan kegiatan-kegiatan pecinta alam.

Ternak seperti Sapi Potong, Sapi Perah, Kambing, Domba, Kerbau, Kuda, Ayam Buras, Ayam Petelur, Ayam Pedaging dan Itik, Burung Puyuh, Burung Dara sangat cocok dikembangkan di Kabupaten ini.

Menyadari besarnya potensi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pemalang mengembangkan

budidaya ikan dan biota air laut. Selain juga berupa perikanan darat berupa Tambak, Kolam, Karamba, dan budidaya biota air tawar.

Dengan areal tambak seuas 1.728 hektar komoditas yang dikembangkan berupa Bandeng, Udang Windu dan Kepiting Soka. Sedangkan produk perikanan laut yang mempunyai nilai jual tinggi diantaranya berupa Ikan Teri Nasi, Udang, Rajungan dan Bawal Putih.

Sektor pertanian dengan lahan sawah seluas 38.617 hektar dan lahan kering 23.813 hektar masih menjadi tulang punggung perekonomian di Kabupaten ini, komoditas yang menonjol untuk tanaman pangan adalah Padi, Ketela Pohon dan Jagung, Sayur-sayuran, Bawang Merah, Cabai Merah dan Ketimun. Sedangkan produksi buah-buahan adalah Nanas Batu, Pisang dan Mangga.

Salah satu andalan Kabupaten Pemalang adalah “Teh” dengan produksi sebesar 927,53 ton, dengan luas area perkebunan sebesar 15.713 hektar. Produksi perkebunan andalan lainnya adalah Tebu, Kelapa Sayur, Glagah Arjuna, Cengkeh, Kopi, Tembakau, Kakao, Lada, Nilam, dan Karet tumbuh subur di Kabupaten ini.

Berbagai kategori hutan tersedia di Kabupaten ini seperti Hutan Lindung, Hutan Suaka Alam dan Wisata, Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Bakau dan Hutan Rakyat. Hasil kehutanan antara lain Kayu Jati, Kayu Albasia, Kayu Mahoni dan juga Getah Pinus.

Kesenian daerah berupa Wayang, Kesenian Krangkeng, Kuda Lumping dan Sintren. Dilengkapi dengan sarana akomodasi hotel serta rumah makan yang menyajikan banyak makanan khas seperti Sate Loso, Nasi Grombyang, Kepiting

Gemes, Apem Comal, Kamir Pemalang dan aneka masakan hasil laut yang pastinya akan memanjakan lidah anda para pecinta wisata kuliner. Sementara itu pasar buah khas Pemalang serta pusat grosir tenun, batik dan kerajinan memberikan banyak pilihan buah tangan khas Pemalang.

Kabupaten Pemalang memiliki sejumlah obyek wisata yang memiliki prospek yang sangat bagus untuk dikembangkan. Beberapa jenis obyek wisata yang dimiliki terdiri dari obyek pegunungan, pantai, air terjun, maupun obyek wisata buatan.

Pantai Widuri, Widuri Waterpark, Pantai Blendung, Pantai Joko Tingkir, Gunung Gajah, Goa Gunung Wangi, Curug Sibedil, Curung Barong, Bukit Mendelem, Telaga Rengganis, Telaga Silating, Kolam Renang Banyumudal Moga, Mata Air Cepaka Wulung, Air Terjun Sipendok, Air Terjun Bengkawah, Air Terjun Lawang dan juga Agropolitan Waliksarimadu.

Dengan jumlah penduduk 1.299.432 jiwa, kehidupan masyarakatnya yang religius dan toleran, pekerja keras dan memiliki semangat bergotong royong yang masih cukup kuat memberikan modal sosial yang kokoh bagi masyarakat Pemalang untuk melangkah lebih maju.

Terwujudnya masyarakat Pemalang yang cerdas, sehat, berdaya saing, dan berakhlak mulia dalam kesatuan wilayah Kabupaten Pemalang yang ikhlas, indah komunikatif hijau lancar aman dan sehat merupakan visi Kabupaten Pemalang.

## **METODE**

Kegiatan ini dilaksanakan pada 11 November 2020 di House Of Bumdes Kecamatan Comal. Selanjutnya, metode yang digunakan adalah metode observasi, metode identifikasi potensi dan permasalahan, dan audiensi dan kolaborasi.

Metode observasi dimaksudkan untuk mengenal secara lebih dekat kondisi wilayah Kabupaten Pemalang yang menjadi lokasi kegiatan serta mengetahui kondisi masyarakat secara sosiologis, ekonomis dan psikologis. Observasi tersebut merupakan kegiatan awal yang harus dilakukan, sebagai bahan masukan untuk memenuhi kebutuhan data yang diperlukan untuk tindak lanjut kegiatan, dan dapat dilaksanakan di berbagai kesempatan dan berbagai medan. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui seberapa besar potensi yang ada di daerah yang dituju, permasalahan apa saja yang dihadapi, sebagai bahan masukan untuk memberikan sebuah Solusi terhadap masalah-masalah dalam kehidupan masyarakat.

Cara yang dilakukan dalam rangka Metode Observasi bersifat Pendataan Primer, yaitu dengan melaksanakan: Survei Lokasi, Pendataan Tertulis dan Perekaman Dokumentasi, Wawancara dengan Nara Sumber. Sedangkan metode identifikasi potensi dan permasalahan dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi permasalahan, menyerap aspirasi masyarakat, dan memerikan segala potensi dan permasalahan. Metode audiensi dan kolaborasi dilakukan untuk melengkapi metode selanjutnya. Audiensi adalah sebuah pertemuan resmi yang diadakan yang diisi dengan ceramah

yang diikuti oleh pengunjung atau pendengar dalam suatu forum tertentu. Sedangkan Kolaborasi merupakan proses partisipasi beberapa orang, kelompok, dan organisasi yang bekerja sama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kolaborasi menyelesaikan visi bersama, mencapai hasil positif bagi khalayak yang mereka layani, dan membangun sistem yang saling terkait untuk mengatasi masalah dan peluang. Kolaborasi juga melibatkan berbagi sumber daya dan tanggung jawab untuk secara bersama merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program-program untuk mencapai tujuan bersama. Anggota kolaborasi harus bersedia untuk berbagi visi, misi, kekuatan, sumber daya dan tujuan. Bentuk penataan yang kooperatif diantara dua pihak atau lebih (yang mungkin atau mungkin tidak memiliki hubungan sebelumnya) yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan Bersama.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Forum Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) bersama gelar audiensi dalam rangka genjot perekonomian desa wilayah Kabupaten Pemalang di House Of Bumdes Kecamatan Comal.

Hadir sebagai narasumber dalam Audiensi dan Kolaborasi tersebut, Komisi A DPRD Provinsi Jateng Muhammad Saleh, ST., Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemalang, Samsat Pemalang, Pakar Manajemen Ekonomi dari Universitas Wahid Hasyim Semarang dan pakar digital dari Desamu Digital.

Ketua Forum BUMDes Bersama Kabupaten Pemalang, Hartoyo, SE., MM mengatakan bahwa acara audiensi dan kolaborasi dilaksanakan dalam

rangka menjalin kerjasama kepada semua *stake holder* untuk perekonomian desa di Kabupaten Pemalang.

Ketua Komisi A DPRD Jawa Tengah bisa hadir di pertemuan ini, dan mempertemukan dengan semua pihak, baik dari Bapenda, Samsat, pakar digital, pakar ekonomi, dan trainer. Kedepannya harapan kami dari kelembagaan forum Bumdes bersama Kabupaten Pemalang bisa bersinergi dan berkolaborasi dalam meningkatkan aktifitas perekonomian desa.

Sementara, Direktur Bumdes Rukun Makmur Kecamatan Ulujami, yang juga sebagai wakil ketua Forum Bumdes Bersama Kabupaten Pemalang mengatakan, Bumdes akan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat dan terus berupaya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan Pendapatan Desa.

Secara umum, inilah saatnya ada sinergi dan berkolaborasi dengan semua pihak, baik pemerintah, swasta dan masyarakat dalam memajukan ekonomi dan menggali potensi pedesaan. Ini semua semata-mata untuk merealisasikan nawa cita presiden Joko Widodo dalam alenia ketiga, yang endingnya untuk mensejahterakan masyarakat desa.

Ketua Komisi A DPRD Jawa Tengah Muhammad Saleh, ST, mengatakan bahwa secara kelembagaan Komisi A DPRD Jawa Tengah hadir di tengah-tengah pengurus BUMDes khususnya di Pemalang, untuk mendengarkan secara langsung aspirasi, kendala dan program perekonomian pedesaan.

Komisi A DPRD Jawa Tengah mempertemukan jaringan-jaringan, mulai dari

pakar digital, pakar ekonomi, Bapenda, Samsat, Kantor Pos untuk bersinergi dalam mempercepat perekonomian pedesaan yang pada akhirnya menuju masyarakat sejahtera.

Pemerintah ingin Pemalang untuk menjadi yang pertama dan terbaik dalam menjalankan program perekonomian terutama dimasa era digital,” imbuhnya.



Gambar 1. Foto Bersama Kegiatan Pendampingan Bumdes di Kabupaten Pemalang.

Hadir dalam acara tersebut, Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa Dispermades Pemalang Triyatno Yuliarso, S.IP., M.Ap., Forum Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kabupaten Pemalang, Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) se-Kab. Pemalang dan pengurus BUMDes Bersama Kecamatan se-Kabupaten Pemalang.

Dalam audiensi dan kolaborasi tersebut dijelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa (PP No 4 tahun 2015).

Hasil kegiatan yang didapatkan adalah pemahaman atas pendirian BUMDes sebagai upaya mensejahterakan masyarakat desa sehingga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya evaluasi kegiatan akan dilakukan dengan pendampingan rutin bagi pengelola BUMDes sehingga nantinya mampu berdiri dengan pengelolaan mandiri.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 hari, mulai dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00. Setiap sesi paparan, dilakukan kegiatan tanya jawab yang aktif dan kondusif. Dengan tetap menjalankan protocol Kesehatan, kegiatan ini dilaksanakan dengan sangat teratur dan antusias. Seluruh peserta juga Nampak paham dan memiliki semangat baru untuk membangun desa bersama BUMDes.

## SIMPULAN

Forum Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) bersama gelar audiensi dalam rangka genjot perekonomian desa wilayah Kabupaten Pemalang dengan narasumber dalam Audiensi dan Kolaborasi tersebut, Komisi A DPRD Provinsi Jateng, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemalang, Samsat Pemalang, Pakar Manajemen Ekonomi dari Universitas Wahid Hasyim Semarang dan pakar digital dari Desamu Digital. Dijeaskan dalam audiensi dan kolaborasi tersebut dijelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya

untuk kesejahteraan masyarakat desa (PP No 4 tahun 2015).

Tujuan Pendirian BUMDes adalah :

- a. Meningkatkan perekonomian Desa
- b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Hambatan pengelolaan BUMDes di Kabupaten Pemalang, antara lain:

- a. Saat memulai, dihindangi demam keraguan atau ketakutan akan suatu kegagalan.
- b. Saat berkompetisi /bersaing, kesulitan memposisikan diri dalam persaingan pasar.
- c. Saat menjaga kontinuitas, bagaimana memelihara kontinuitas/ kelanggengan BUMDes.

Audiensi dan kolaborasi tentang pemasaran mengemukakan prinsip dalam manajemen mencakup *planning/* perencanaan, *organizing/* pengorganisasian, *actuating/* penggerakan/ pelaksanaan, dan *controlling/* pengendalian.

Bauran Pemasaran terdiri dari 4P menjadi 7P dan berkembang menjadi 9 P, yaitu:

- a. *Product* / Produk
- b. *Price* / Harga
- c. *Promotion* / Promosi
- d. *Place* / Tempat
- e. *People* / SDM
- f. *Procces* / Proses
- g. *Physical Evident* / Bukti Fisik:
  - 1) Bukti penting (*essential evidence*)
  - 2) Bukti tambahan (*peripheral evidence*)
- h. Strategi *Packaging* / Kemasan
- i. Strategi *Payment* / Pembayaran

Audiensi dan kolaborasi tentang brand dan branding mengemukakan 7 Langkah Membuat *Brand* Bisnis

- a. Cari Tahu Siapa Target Audiens dan Kompetitor. Ada banyak cara untuk membantu Anda, antara lain:
- b. Tentukan Fokus dan Karakteristik *Brand* Anda.
- c. Tentukan nama *Brand* Anda. Gunakan *tool* berikut sebagai bantuan:
- d. Tentukan Slogan *Brand* Anda.
- e. Tentukan Penampilan/ Gaya *Brand* Anda.
- f. Desain logo untuk *Brand* Anda.
- g. Kembangkan terus.

#### DAFTAR PUSTAKA

Amalia E. Maulana, "Brand, Branding, Dan Peranannya Bagi Perusahaan"

Anom, P.S.. 2015. *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia

- Assauri, S., 2010, *Management Pemasaran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chan, G. 2012, *The 9 Ps In Marketing Mix*, Diakses Pada Tanggal 10 April 2016 Dari [Http://www.foxbusinessjournal.com/mkt/9ps.html](http://www.foxbusinessjournal.com/mkt/9ps.html)
- Dchultz,D.E.&Barnes, B.E. 1999. *Strategic Brand Communication Campaigns*. Illionis: Ntc Business Books.
- Durianto, 2001. *Strategi Menaklukan Pasar Melalui Riset Ekuitas Dan Perilaku Merek* Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama
- Gelder, S.V. 2005. *Global Brand Strategy*. London: Kogan Page.
- Kotler, P. & Hermawan K. 2000. *Repositioning Asia From Ibubble To Sustainable Economy*, Singapore: John Wiley & Sons.
- Kotler, P. 2003, *Principles Of Marketing*, Prentice-Hall, Dalam Buku *Brand Operation* (Erlangga Group, 2010) Hlm 10
- Kotler, P. 2002. *Marketing Management*. New Jersey: Prentice Hall.
- Kotler, P. Dan Amstrong, P. 1989, *Dasar-Dasar Pemasaran*, Jakarta: Prenhallindo.
- Kurniawan, A.R. 2014, *Total Marketing*, Yogyakarta: Pt. Buku Kita.
- Lupiyoadi, R. Dan Hamdani, A. 2006, *Manajemen Pemasaran Jasa*, Jakarta : Salemba Empat.
- Sandiasa, Gede Dan Ida Ayu Putu Sri Widnyani, 2017. "Kebijakan Penguatan Lembaga Pemberdayaan Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemberdayaan Masyarakat Di Perdesaan". Dalam *Locus Majalah Ilmiah Fisip* Vol 8 No. 1- Agustus 2017, P. 64-78
- Suharno Dan Sutarso, Y. 2010, *Marketing In Practice*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suprianto, 2017. Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) Terhadap Peningkatan Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) Di Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* Vol.14 No.1.

372 *Pendampingan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Kabupaten Pemalang – Maskudi, Ratih Pratiwi, Eva Fatimah, Yulekhah Ariyanti*  
DOI: <https://doi.org/10.31004/abdidas.v3i3.583>

Susanto, A.B. & Wijanarko, H. 2004. *Power Branding: Membangun Merek Unggul & Organisasi Pendukungnya*, Jakarta Selatan: Quantum Bisnis & Manajemen

Tanjung, J.W. 2003, *Marketing Management*, Surabaya: Bayumedia.

Tjiptono, F. 2007, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Andi.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Peraturan Mendagri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)